

Judul : Tekanan ekonomi global, komisi IX ingatkan perlindungan pekerja
Tanggal : Minggu, 12 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tekanan Ekonomi Global

Komisi IX Ingatkan Perlindungan Pekerja

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan mengantisipasi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global. Pastikan hak buruh bisa diperoleh secara cepat, mudah, serta sesuai aturan yang berlaku. Karena skema pencairan yang responsif sangat menolong para korban PHK.

Menurutnya, negara wajib melindungi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kondisi ekonomi global. Mekanisme pencairan hak mereka harus dipercepat agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup. Ini juga menopang kelangsungan hidup mereka selama proses mencari pekerjaan baru.

Dia bilang, percepatan penyaluran hak pekerja saat terjadi PHK seperti Sritex jadi praktik baik. Itu harus kembali diterapkan jika terjadi gelombang serupa pada masa mendatang. "Pemerintah bisa memberlakukan sistem serupa agar ribuan pekerja memperoleh hak mereka dalam waktu singkat,"

katanya, Rabu (8/7/2026).

Dia menegaskan, penanganan potensi gelombang PHK tidak cukup hanya berfokus pada pemberian hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja terjadi. Antisipasi ini juga harus disertai berbagai langkah pencegahan yang komprehensif. Tujuannya, perusahaan tetap mampu mempertahankan seluruh tenaga kerja yang dimiliki saat ini.

Kata Charles, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang diinisiasi Pemerintah bersama DPR patut diapresiasi. Tim itu diharapkan mampu mendeteksi lebih dini perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja. "Tim ini juga bertugas memfasilitasi solusi agar kebijakan PHK bisa dihindari oleh manajemen perusahaan," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Samuel JD Wattimena mengusulkan mitigasi konkret menghadapi ancaman PHK massal akibat tekanan ekonomi global. Apalagi, penguatan dolar AS juga ikut memperparah kondisi industri nasional. Buruh terdampak harus mendapatkan pembinaan



Charles Honoris

keterampilan ulang agar mampu mengolah potensi ekonomi daerah.

Menurut Samuel, keahlian buruh pabrik yang terlalu spesifik sering tidak relevan saat mereka terpaksa pulang ke kampung halaman akibat PHK. Karena itu, kepala daerah wajib menyiapkan konsep matang untuk memetakan kekuatan ekonomi lokal. "Ini berguna agar lahan produktif pedesaan bisa diolah kembali," terangnya.

Selain itu, dalam persoalan ini peran legislator juga sangat dibutuhkan. Makanya, masa

reses mendatang harus jadi momentum jajaran Komisi VII DPR untuk mengkaji kondisi riil sektor industri. Anggota DPR wajib berdialog langsung dengan para buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Samuel menegaskan, pandangan ini masih berupa pemetaan awal mengingat rumitnya persoalan makro ekonomi nasional saat ini. Masalah ketenagakerjaan memang sangat kompleks sehingga usulan yang diajukan sifatnya masih di permukaan. "Pembahasan mendalam akan terus dilakukan seluruh anggota legislatif pada setiap daerah," katanya.

Sejalan dengan itu, Menaker Yassierli memastikan Satgas PHK bekerja secara aktif untuk memitigasi potensi PHK di berbagai sektor. Tim itu memantau sistem peringatan dini terhadap industri yang rawan melakukan pengurangan karyawan. Intervensi segera dilakukan jika ditemukan kasus yang mengancam stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Dia mengatakan, tahapan perusahaan untuk melakukan PHK

cukup panjang, sehingga membutuhkan proses yang terstruktur. Satgas yang dipimpin Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi itu bisa menjalankan tugas mitigasi dengan optimal. "Penanganan ini mencakup proses mediasi yang adil antara seluruh pihak terkait yang bersengketa," jelasnya.

Yassierli mencontohkan pencegahan PHK di salah satu sektor padat karya akibat tingginya harga gas industri beberapa waktu lalu yang sukses teratasi. Satgas PHK langsung turun tangan melakukan intervensi begitu isu kelangkaan komoditas muncul ke permukaan. Upaya responsif ini berhasil menyelamatkan nasib ribuan tenaga kerja.

Kemnaker, sambungnya, juga aktif melakukan upaya pencegahan PHK serta peningkatan kompetensi bagi korban terdampak. Program strategis seperti Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional terus dioptimalkan secara masif. "Langkah nyata ini disiapkan untuk meningkatkan kemampuan serta produktivitas angkatan kerja muda Indonesia," tandasnya. ■ PYB